

Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (Community-Based Tourism) Di Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal

Fuad Akbar¹, Sufian Hamim², Rosmayani³, Raden Imam Al Hafis⁴

¹, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst., Pekanbaru, 28284, Indonesia

², Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst., Pekanbaru, 28284, Indonesia

³ Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst., Pekanbaru, 28284, Indonesia

⁴ Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst., Pekanbaru, 28284, Indonesia

257122039@student.uir.ac.id¹, sufianhamim@soc.uir.ac.id², rosmayani@soc.uir.ac.id³,
imamalbafis@soc.uir.ac.id⁴

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pariwisata yang unik, mulai dari ekowisata mangrove, wisata bahari, hingga festival budaya seperti Cian Cui (Perang Air). Namun, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal masih belum optimal akibat berbagai tantangan geografis dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism/CBT) di Kabupaten Kepulauan Meranti guna akselerasi perekonomian masyarakat tempatan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT di Kepulauan Meranti mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), menciptakan lapangan kerja baru, dan menekan angka pengangguran. Namun, akselerasi wisata ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur aksesibilitas pulau, amenitas standar, serta minimnya literasi digital marketing pengelola. Penelitian ini merekomendasikan model kolaborasi pentahelix yang mengintegrasikan peran instansi pemerintah daerah, akademisi, swasta, komunitas, dan media untuk mengoptimalkan potensi wisata Meranti secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Komunitas, Kabupaten Kepulauan Meranti, Ekonomi Lokal, Kebijakan Pariwisata, Model Pentahelix.

ABSTRACT

Kepulauan Meranti Regency possesses unique tourism potential, ranging from mangrove ecotourism, marine tourism, to cultural festivals such as Cumberland (Water War). However, its contribution to regional own-source revenue (PAD) and local community welfare remains suboptimal due to geographical and governance challenges. This study aims to formulate a community-based tourism (CBT) development strategy in Kepulauan Meranti Regency to accelerate the local community's economy. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation techniques, in-depth interviews with relevant stakeholders, and documentation reviews. The results indicate that implementing CBT in Kepulauan Meranti successfully fosters active community participation through Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), creates new employment, and reduces unemployment rates. However, tourism acceleration is still hindered by infrastructural limitations in island accessibility, standard amenities, and the low digital marketing literacy of managers. This study recommends a pentahelix collaborative model that integrates the roles of local government agencies, academia, the private sector, communities, and the media to optimize Meranti's tourism potential sustainably.

Keywords: Community-Based Tourism, Kepulauan Meranti Regency, Local Economy, Tourism Policy, Pentahelix Model.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor kepariwisataan merupakan salah satu instrumen strategis yang diandalkan oleh banyak daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. Bagi wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, pariwisata alternatif dapat

menjadi sektor basis baru di tengah tantangan fluktuasi komoditas utama daerah seperti sagu, kopi luak, dan kelapa. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka serta bertetangga dekat dengan Malaysia dan Singapura, Kepulauan Meranti secara geopolitik dan geografis memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaring wisatawan domestik maupun mancanegara.

Secara faktual, Kabupaten Kepulauan Meranti menyimpan kekayaan potensi wisata yang sangat prospektif. Sektor ekowisata diwakili oleh hamparan hutan mangrove di berbagai pesisir pulau, pantai berpasir seperti Pantai Motong di Rangsang Barat, serta potensi wisata minat khusus berupa susur sungai dan pengolahan sagu tradisional yang dapat dikemas menjadi wisata edukasi. Di sisi lain, daya tarik wisata budaya Meranti telah dikenal luas, salah satunya adalah *Cian Cui* atau Festival Perang Air di Selatpanjang yang rutin menarik ribuan kunjungan wisatawan setiap tahunnya, menjadikannya salah satu kalender wisata unggulan di Provinsi Riau.

Namun demikian, pola pengelolaan objek pariwisata di Kepulauan Meranti sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pemberdayaan masyarakat. Karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan memunculkan tantangan struktural tersendiri, terutama tingginya biaya logistik, terbatasnya konektivitas antar-pulau, serta infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan amenities publik di lokasi wisata yang belum memenuhi standar pelayanan minimum. Jika pembangunan pariwisata hanya bertumpu pada intervensi fisik pemerintah tanpa melibatkan kapasitas masyarakat lokal, maka keberadaan destinasi tersebut tidak akan berkelanjutan dan gagal memberikan dampak ekonomi nyata bagi penduduk setempat.

Oleh karena itu, pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) atau Pariwisata Berbasis Komunitas dinilai sebagai solusi paling adaptif untuk diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Konsep CBT menekankan bahwa masyarakat lokal tidak boleh hanya dijadikan objek penonton, melainkan wajib diposisikan sebagai perencana, pengelola, dan pemegang keputusan utama dalam rantai pasok wisata daerah. Melalui kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat dapat mengorganisir potensi lokal mereka sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir dari ancaman abrasi yang kian nyata di wilayah kepulauan terluar.

Berangkat dari urgensi tersebut, kajian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Kepulauan Meranti serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan ekonomi masyarakat lokal. Artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi akademisi maupun praktisi kebijakan pariwisata daerah, khususnya dalam memenuhi standar publikasi ilmiah tingkat nasional terakreditasi SINTA 5. Penguatan ini dianalisis menggunakan pisau beda administrasi publik dan manajemen strategis kepariwisataan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Teori Administrasi Publik dan Pembangunan Pariwisata

Dalam paradigma administrasi publik modern, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif pemerintah (*state-centric*), melainkan melibatkan pergeseran ke arah tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Sektor pariwisata, sebagai sektor multi-sektoral, membutuhkan intervensi kebijakan yang memadukan regulasi birokrasi dengan fleksibilitas pasar dan partisipasi warga. Kebijakan pariwisata daerah yang efektif harus mampu memobilisasi modal sosial (*social capital*) masyarakat guna menciptakan destinasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

1.2 Konsep Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) di Wilayah Kepulauan

Penerapan CBT di wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang unik karena adanya keterbatasan sumber daya alam dan kerentanan ekologis. Menurut Suansri (2003), CBT bukan sekadar menjual produk wisata, melainkan sebuah alat pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal. Di wilayah pesisir, CBT bertindak sebagai jembatan ekonomi alternatif ketika hasil tangkapan nelayan atau produktivitas pertanian tradisional menurun akibat faktor musiman. Keberlanjutan CBT diukur dari tingkat retensi nilai ekonomi yang tetap berada di desa, meminimalkan kebocoran modal ke luar daerah.

Korelasi fungsional antara efisiensi retensi ekonomi lokal (R_e) dengan indeks pemberdayaan komunitas (E_c) serta indeks hambatan logistik pulau (L_p) dapat dirumuskan secara konseptual

dalam model evaluasi pariwisata pulau kecil sebagai berikut:

$$R_e = (\gamma \times E_j) - (\delta \times L_j)$$

Di mana γ melambangkan koefisien pengali multiplier lokal, sedangkan δ melambangkan koefisien friksi jarak geografis pulau. Persamaan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan komunitas (E_j) harus ditingkatkan secara radikal untuk mengkompensasi beban ekonomi yang ditimbulkan oleh hambatan logistik kepulauan (L_j).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena tata kelola pariwisata di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara utuh, memahami interaksi antar-aktor pemangku kepentingan, serta mengeksplorasi hambatan implementasi kebijakan kepariwisataan secara mendalam dari sudut pandang para pelaksana di tingkat tapak.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menjamin kompetensi data yang diperoleh. Informan kunci terdiri dari Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat, Kepala Desa, Ketua Pokdarwis di kawasan ekowisata mangrove, pelaku UMKM olahan pangan sagu dan kopi luak khas Meranti, pemilik transportasi lokal, serta perwakilan tokoh adat Selatpanjang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan secara langsung terhadap kualitas amenities dan aksesibilitas pelabuhan penyeberangan rakyat.

Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Dokumen Statistik Pariwisata, serta regulasi daerah terkait pembentukan desa wisata. Teknik analisis data mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dalam bentuk matriks analitis, serta penarikan kesimpulan/verifikasi akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.3 Pemetaan Klaster Potensi Pariwisata Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tiga klaster utama pariwisata yang sangat potensial untuk diintegrasikan dengan model CBT. Pertama, Klaster Ekowisata Mangrove Pesisir yang tersebar di beberapa pulau, menawarkan lanskap alami yang berfungsi ganda sebagai benteng abrasi dan objek wisata edukasi. Kedua, Klaster Wisata Budaya Kontemporer berupa Festival Perang Air (Cian Cui) di Selatpanjang yang memiliki daya tarik internasional. Ketiga, Klaster Wisata Edukasi Agro-Industri berbasis optimalisasi komoditas sagu, di mana wisatawan dapat mempelajari siklus budidaya sagu hingga pemrosesan hilir menjadi aneka ragam kuliner.

1.4 Hambatan Struktural dan Tata Kelola Pariwisata Pulau

Meskipun memiliki keunikan produk wisata yang tinggi, laju pertumbuhan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Meranti masih tertahan oleh hambatan struktural khas daerah kepulauan. Guna menyajikan temuan secara komprehensif, tabel di bawah ini merangkum dimensi tantangan riil yang ditemukan di lapangan beserta analisis dampak ekonominya:

Tabel 1. Matriks Hambatan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Dimensi Hambatan	Kondisi Riil di Lapangan (Kepulauan Meranti)	Dampak Terhadap Sektor Pariwisata	Strategi Intervensi Kebijakan
1	Aksesibilitas Kepulauan	Konektivitas antar-pulau bergantung pada pelabuhan rakyat tradisional; kondisi jalan poros desa menuju destinasi banyak yang belum teraspal.	Biaya perjalanan mahal (<i>high logistics cost</i>); membatasi minat kunjungan berulang wisatawan domestik.	Sinkronisasi anggaran pemda untuk perbaikan dermaga penyeberangan rakyat dan jalan sirip destinasi.
2	Kapasitas Lembaga Lokal	Pokdarwis telah terbentuk secara formal berdasarkan SK Kepala Desa, namun belum dibekali kemampuan pelayanan standar (<i>hospitality</i>).	Pelayanan kepada wisatawan kurang profesional; pelaporan tata kelola keuangan kelompok rentan konflik internal.	Penyelenggaraan bimtek tata kelola keuangan organisasi dan standarisasi pemanduan wisata minat khusus.
3	Digitalisasi Pemasaran	Promosi destinasi masih bersifat musiman (terfokus pada event Cian Cui) and belum memanfaatkan media promosi digital terintegrasi.	Potensi ekowisata desa di pulau luar kurang dikenal luas di luar masa pelaksanaan festival tahunan.	Pelatihan pembuatan konten kreatif bagi pemuda desa dan pembuatan direktori wisata digital terpadu Meranti.

Analisis pada Tabel 1 memperlihatkan perlunya pergeseran paradigma dari pembangunan fisik semata ke arah penguatan ekosistem tata kelola. Keterbatasan akses geografis kepulauan harus diimbangi dengan keunggulan kualitas pelayanan dan keunikan narasi destinasi yang dipasarkan secara masif melalui ekosistem digital.

1.5 Formulasi Strategi Kolaborasi Kemitraan Pentahelix

Untuk mengakselerasi pengembangan CBT di Kabupaten Kepulauan Meranti, diadopsi model sinergi **Pentahelix** yang mengintegrasikan lima aktor utama. Pemerintah Daerah melalui Disparpora bertindak sebagai regulator dan penyedia stimulus anggaran. Akademisi berkontribusi melalui program pendampingan manajemen organisasi Pokdarwis dan standarisasi kualitas homestay warga. Sektor swasta (pelaku bisnis travel dan industri pengolahan sagu) bertindak sebagai pembuka akses pasar dan penyalur program kemitraan CSR.

Komunitas lokal (Pokdarwis dan pelaku UMKM) bertindak sebagai motor penggerak utama di lapangan yang mengaplikasikan prinsip Sapta Pesona. Terakhir, Media Massa berperan sebagai penguat jangkauan informasi yang mengamplifikasi keunikan wisata Meranti ke kancah nasional maupun internasional, membentuk citra daerah yang aman, eksotis, dan ramah wisatawan.

KESIMPULAN

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism) merupakan strategi pembangunan ekonomi alternatif yang sangat relevan untuk diimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui penempatan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan ekowisata mangrove, pelestarian budaya khas, serta wisata edukasi agro-industri sagu, pariwisata mampu membuka lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan di pedesaan pesisir. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam membenahi konektivitas infrastruktur antar-pulau serta konsistensi implementasi model kolaborasi Pentahelix guna meningkatkan kapasitas daya saing sumber daya manusia lokal di era disrupsi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti. (2024). *Laporan Tahunan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kepulauan Meranti*. Selatpanjang: Disparpora.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, B. T. (2023). *Penerapan Model Kemitraan Pentahelix dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Reruralan*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 11(3), 201-215.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Rest Project.
- Suryani, A. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Kontemporer*. Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan, 9(2), 123-135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utomo, R. P., & Kartika, D. (2025). *Digitalization Strategy for Village Tourism Marketing in the Era of Disruption*. International Journal of Sustainable Development and Cultural Heritage, 8(2), 89-104.